BERITA
SEKRETARIAT DPRD PROV SULSEL

Hari/Tanggal : RABU, 19 AGUSTUS 2020
Nama Koran : FAJAR
Halaman : 9

Kembalikan Dana Covid-19 Biayai Infrastruktur

> "SK parsial pertama, kita refocusing Rp250 miliar. Kemudian berikutnya refocusing lagi Rp250 miliar sebagai cadangan."
>
> **Fachruddin Rangga**
> Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel

MAKASSAR, FAJAR — Anggaran sebesar Rp250 miliar dikembalikan ke program awal APBD Sulsel 2020. Akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Sejatinya, anggaran tersebut hasil refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19. Pemprov Sulsel mengalokasikan Rp500 miliar dari hasil refocusing anggaran.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Fachruddin Rangga mengatakan, meski masih dalam pembahasan, dewan sudah menyepakati pengembalian anggaran tersebut. Apalagi, penggunaan anggaran Covid-19 tahun ini belum mencapai Rp200 miliar.

Padahal, anggaran yang tersedia awalnya sebesar Rp500 miliar. Anggaran dialokasikan dalam dua kali SK parsial saat awal pandemi Covid-19. "SK parsial pertama, kita refocusing Rp250 miliar. Kemudian berikutnya refocusing lagi Rp250 miliar sebagai cadangan," bebernya kepada *FAJAR*, Selasa, 18 Agustus.

Hanya saja, kata dia, Pemprov Sulsel ternyata tak menggunakan anggaran cadangan tersebut. Bahkan, serapan anggaran Covid-19 belum mencapai Rp200 miliar. Masih ada sisa dari proses refocusing awal.

Dengan pertimbangan tersebut, dewan pun menyepakati agar anggaran Rp250 miliar dikembalikan ke program sebelumnya. Apalagi, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 tak butuh lagi dana besar, lantaran semua fasilitas penunjang sudah terpenuhi.

"Sekarang masih dalam pembahasan item kegiatan apa saja yang akan dikembalikan. Pada dasarnya, kami harap agenda pembangunan yang sempat tertunda akibat refocusing bisa berlanjut kembali," imbuh politikus Partai Golkar tersebut.

Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Junaedi mengatakan, belum bisa memastikan proyek mana yang akan kembali pasca adanya proses refocusing. Yang pasti, alokasi paling besar untuk pengembalian ada pada kegiatan infrastruktur pemerintah.

Misalnya saja di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, beberapa proyek jalan, batal lantaran terkena refocusing anggaran. Akan tetapi, pembangunan jalan di daerah yang mengalami pembatalan tersebut akan kembali dilelang jika sudah ada persetujuan SK Parsial.

"Saya belum hitung riilnya. Yang pasti semua kegiatan infrastruktur di APBD Pokok. Ini kita dorong untuk dilaksanakan guna pemulihan ekonomi. Agar ada kegiatan yang bisa menambah daya serap tenaga kerja," tambahnya.

Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUTR Sulsel, Eddy Jaya Putra mengatakan, masih menunggu kebijakan perubahan anggaran lewat SK Parsial. Apalagi ada lima proyek jalan yang terancam batal, dengan total anggaran sebesar Rp20 miliar lebih.

Belum lagi tender lain yang menurutnya berpotensi berstatus utang. Misalnya saja akses jalan di SPN Batua yang anggarannya hanya tersedia sebesar Rp3 miliar. Namun nilai tendernya sebanyak Rp6 miliar. "Kalau tidak ada pengembalian, artinya kita berutang," tambahnya. **(ful/rif)**

BERITA
SEKRETARIAT DPRD PROV SULSEL

Hari/Tanggal : 19 AGUSTUS 2020
Nama Koran : HARIAN RADAR MAKASSAR
Halaman : 4

Andi Anwar Purnomo Gelar Sosper

ANGGOTA DPRD Sulsel Fraksi PKB, Andi Muhammad Anwar Purnomo, SH. MH melaksanakan Sosialisasi dan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Sulsel Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah di Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, (16/8/2020).

Sosialisasi itu juga dihadiri oleh Bupati Bulukumba AM Sukri A Sappewali, Wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto, Legislator PKB DPRD Bulukumba A Soraya Widiyasari, Ketua KONI Bulukumba A Makkasau, Lurah Matekko A Muhammad Refa, tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan perempuan.

Andi Muhammad Anwar Purnomo mengatakan bahwa sosialisasi ini adalah salah satu tugas anggota DPRD Sulsel untuk menyebarluaskan Perda terkait tupoksi kewenangan pemerintah Sulawesi Selatan.

"Dalam Perda tersebut diatur batasan dan kewenangan Pemprov Sulsel, sehingga tidak terjadi tumpang tindih, semua bekerja berdasarkan kewenangannya untuk membangun Bulukumba," ujar Politisi PKB yang kerap disapa Aan tersebut.

Sementara itu, Wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto mengatakan bahwa Perda Pemprov Sulsel No 8 Tahun 2016 sangat jelas, sebagai pemerintah daerah tidak bisa mengambil kebijakan yang sifatnya kewenangan Pemprov ataupun pemerintah pusat.

"Misalnya infrastruktur jalan raya dari Bantaeng, Bulukumba sampai ke Sinjai itu adalah kewenangan pemerintah pusat," ungkap Tomy. **(fad/niz)**

FAD/RADAR MAKASSAR

SOSIALISASI. Anggota DPRD Sulsel Fraksi PKB, Andi Muhammad Anwar Purnomo, SH. MH melaksanakan Sosialisasi dan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Sulsel Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah di Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, (16/8/2020).

BERITA
SEKRETARIAT DPRD PROV SULSEL

Hari/Tanggal : RABU 19 AGUSTUS 2020
Nama Koran : Rakyat Sulsel
Halaman : 3

Tinggalkan Kader, Demokrat Dukung Tajerimin-Havid

MAKASSAR, RAKSUL - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Sulsel akhirnya memutuskan kemana arah dukungan untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Maros 9 Desember mendatang.

Partai berlambang mercy ini yang sebelumnya mendorong kader internal mereka yakni Ketua DPC Demokrat Maros, Amirullah Nur, namun dia tidak mampu mendapatkan partai tambahan atau pengusung karena Demokrat di Maros hanya memiliki satu kursi sementara syarat maju minimal mendapatkan dukungan dari Parlemen minimal 7 kursi.

"Kalau di Maros kita sudah selesai, kita sudah ke pasangan Andi Tajerimin-Havid Pasha," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Demokrat Sulsel, Selle KS Dalle, Selasa (18/8).

Ketua komisi A DPRD Sulsel ini menyebutkan dari beberapa kandidat yang ada di Maros, pasangan Tajerimin-Havid Pasha memiliki peluang untuk menang. "Kita lihat pasangan ini memiliki peluang untuk menang," ucapnya.

Untuk penyerahan rekomendasi kata dia, dalam waktu dekat ini, Demokrat akan menyelesaikan tiga daerah yang belum mendapatkan mandat yakni pasangan Zainuddin-Aji Sumarno (Selayar), Andi Kaswadi Razak - Lutfi Halide (Soppeng) dan Tajerimin-Havid Pasha (Maros).

"Mungkin Rabu (hari ini) kita akan serahkan rekomendasi itu," tutupnya. **(Fah/C)**

BERITA

SEKRETARIAT DPRD PROV SULSEL

Hari/Tanggal : RABU, 19 AGUSTUS 2020

Nama Koran : Tribun Timur

Halaman : 2

PAN Fiks, PKS: Semua Bisa Berubah Kemungkinan

ASHABUL Kahfi memastikan rekomendasi model B1-KWK PAN akan diserahkan ke pasangan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin Nurdin Halid (Imun), pekan depan.

Menurut Kahfi, penyerahan rekomendasi sejauh ini masih dalam koordinasi serta menunggu momen tepat.

"Sementara dikoordinasikan dik. InsyaAllah, pekan depan diserahkan," kata Anggota Komisi IX DPR RI tersebut, Selasa (18/8). Selain PAN dan Golkar yang memastikan usungan ke Imun, Hamzah Hamid menyebut Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Sampai hari ini masih Golkar, PAN, dan PKS. Yang saya tahu baru tiga. Itu menurut informasi dari Pak None," jelas Hamzah.

Terpisah, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW PKS Sulsel Sri Rahmi menyatakan partainya belum mengeluarkan rekomendasi di Pilwali Makassar. "Belum," singkat Bunda Rahmi, sapaannya.

Sebelumnya, PKS Sulsel menerbitkan surat tugas kepada Syamsu Rizal MI atau Deng Ical. Belakangan, DPP PKS disebutkan menerbitkan surat rekomendasi usungan kepada pasangan Imun. Menurutnya, semua kemungkinan masih terbuka. "Semua kemungkinan bisa berubah dalam sekejap," ujar Rahmi.

Selain PKS dan PAN, partai yang belum menerbitkan rekomendasi B1-KWK di pilwali yakni PPP, Perindo, dan Partai Berkarya. Sebelumnya, elite partai pengusung Dilan menyebut masih menunggu PKS untuk mematangkan rencana deklarasi.

"Kami sangat senang jika akhirnya bisa kembali bekerja sama PKS di Makassar untuk memenangkan Dilan. Pasti kita tunggu," kata Ketua DPD PDIP Sulsel Andi Ridwan Wittiri via rilis tim Dilan belum lama ini. Senada Ketua Hanura Sulsel Andi Ilhamsyah Mattalatta.

Sejauh ini baik Imun maupun Dilan di atas kertas sudah memenuhi syarat minimal 10 kursi DPRD tanpa PKS. Dilan sudah mengantongi rekomendasi PDIP, PKB, dan Hanura dengan total 10 kursi. Imun sudah 11 kursi dengan dukungan Golkar dan PAN.**(zis/aly)**

Sri Rahmi

BERITA
SEKRETARIAT DPRD PROV SULSEL

Hari/Tanggal : RABU, 19 AGUSTUS 2020
Nama Koran : Berita Kota MAKASSAR
Halaman : 1

Tol Layang dan Bandara Buntu Kunik Siap Diresmikan

MAKASSAR, BKM -- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sulsel Rudy Djamaluddin, menyebut bahwa dari laporan yang masuk, dua proyek strategis Sulsel saat ini dalam progress penyelesaiannya. Masing-masing Jalan Tol Layang AP Petta Rani dan Bandara Buntu Kunik, Tana Toraja.

Untuk jalan tol layang, kata dia, tidak ada masalah. September mendatang sudah dirampungkan. Sementara untuk Banda Buntu Kunik, kata Rudy, sudah dilakukan test landing belum lama ini.

"Untuk saat ini, jalan tol layang tidak ada masalah. Insyaallah September sudah rampung. Buntu Kunik juga sudah siap karena sudah lakukan test landing di sana. Intinya sudah siap," kata Rudy yang ditemui di Balai Kota Makassar, Selasa (18/8).

Dia mengatakan, hingga saat ini, agenda untuk peresmian kedua proyek tersebut masih akan dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo. Namun untuk jadwal, masih tentatif. Belum ada kepastian kapan tepatnya akan diresmikan oleh orang nomor satu Indonesia itu.

"Kita harapkan kunjungan Bapak Presiden menjadi penyemangat bagi kita. Support bagi Pemerintah Provinsi Sulsel terkait dengan dorongan pembangunan infrastruktur," tandasnya.

Proyek Kereta Api

Komisi D DPRD Sulsel Jhon Rende Mangontan mengemukakan, pembebasan lahan untuk pembangunan rel kereta api harus diseriusi. "Pada prinsipnya kita menyesal dan kecewa jika pemerintah daerah tidak serius terkait pembebasan lahan, agar permasalahannya tidak berlarut-larut. Kapan pemerintah daerah lamban atau tidak serius, tidak tertutup kemungkinan proyek tersebut dipindahkan ke daerah Jawa atau provinsi lainnya," jelas Jhon, Selasa (18/8).

Legislator Partai Golkar Sulsel ini menilai jika proyek tersebut selesai, maka sangat bermanfaat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, juga untuk kelancaran moda transportasi dari Kota Makassar hingga daerah Maros, Barru, dan Kota Parepare.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel Ince Langke IA menegaskan, proyek jalan kereta api merupakan salah satu proyek strategis yang diharapkan menjadi daya dukung bagi percepatan pembangunan. "Saya yakin bahwa pemprov atau Pak Gub memberi perhatian penuh dengan berbagai kebijakan penting agar proyek ini bisa berjalan dengn baik. Pasti Pemprov dan kita semua tidak berkenan proyek ini pindah ke daerah lain, sebab kita rugi. Ini peluang yang sangat bagus," tandas Ince Langke.

Wakil Ketua DPRD Sulsel Darmawangsyah Muin, berujar bila selama dirinya selesai menjadi ketua komisi D tidak begitu mengikuti perkembangannya.

"Saya sudah tidak mengikuti lagi perkembangannya. Tapi jika memang betul info yang berkembang bahwa proyek kereta api akan dihold sementara, sesungguhnya sangat disayangkan. Di saat rakyat Sulsel sudah lama menanti moda transportasi yang efesien, cepat dan murah dan yang masuk klasifikasi itu adalah kereta api," terangnya.

Untuk itu, legislator Partai Gerindra Sulsel ini berharap agar pemerintah pusat dapat memahami dan mempertimbangkan jika ada niat untuk memindahkan. Mudah-mudahan pemerintah pusat dapat mempertimbangkan itu, mengingat anggaran yang digelontorkan selama ini sudah sangat besar sisa dilanjutkan hingga selesai.

"Saya juga mengharapkan seluruh anggota dewan pusat dari Sulsel bersatu memperjuangkan kelanjutan proyek mecusuar ini demi kemajuan daerah sebagai pintu gerbang pembangunan Indonesia timur," harapnya. **(rhm-rif)**